



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**

**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN  
(RENJA SKPK) TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN  
(BPKK)  
TAHUN 2022**



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 119 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN  
ACEH JAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
  23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
  24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 22);
  25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya
- 
- 

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
  27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
  28. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 67);
  29. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
  30. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan unsur penunjang fungsi keuangan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra BPKK Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan BPKK Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renja BPKK adalah dokumen perencanaan BPKK untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023

#### Pasal 2

Renja BPKK Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKK yang berpedoman kepada Renstra BPKK Tahun 2023-2026 dan RKPK Tahun 2023.

#### Pasal 3

Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- BAB III : Tujuan dan Sasaran;
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan;
- BAB V : Penutup.

#### Pasal 4

Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi BPKK dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 6

- (1) Kepala BPKK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja BPKK.
- (2) Kepala BPKK melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja BPKK kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja BPKK Tahun 2023 dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan RPKK Tahun 2023.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renja BPKK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Juli 2022 M

15 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 14 Juli 2022 M

15 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 114 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 JULI 2022 M  
15 DZULHIJAH 1443 H



**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN  
(RENJA-SKPK)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN (BPKK)  
ACEH JAYA  
TAHUN 2023**

**DEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN  
(BPKK) ACEH JAYA  
2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya telah rampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa untuk melaksanakan secara bertahap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan memperhatikan seluruh aspek strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK.

Perkembangan konsepsivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) akan sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan SKPK berdasarkan Renstra dan Program Tahunan SKPK, sebagai wujud pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan efektif serta transparan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Akhirnya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diharapkan lebih aktif dan motivatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan target yang akan dicapai.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami menyadari masih banyak kekurangan maka kami sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Calang, 15 Juli 2022

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten  
Aceh Jaya

  
**SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P**

Pembina Utama Muda

Nip 19720327 200212 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan Renja Kerja .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKK TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Renstra Capaian BPKK.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BPKK .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK.....</b>	<b>45</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKK .....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancamanyang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Kabupaten

- Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
  28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
  29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
  30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
  31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
  32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten) Aceh Jaya Tahun 2023-2026;
  33. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023;
  34. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 114 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BPKK Aceh Jaya.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh BPKK sehingga dapat mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja**

Renja BPKK Aceh Jaya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Renja BPKK adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKK TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKK; Analisis Kinerja Pelayanan BPKK; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK; Review Terhadap Rancangan Awal RKPK; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK ACEH JAYA**

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja BPKK; dan Program dan Kegiatan.

#### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.

#### Bab IV PENUTUP

Berisi ringkasan singkat tentang acuan dasar dalam melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN KABUPATEN TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPK tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPK merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPK yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKK Aceh Jaya dalam menyusun Program Kegiatan. BPKK Aceh Jaya, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

BPKK dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBK, Perubahan APBK dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKK sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan untuk tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat;
3. Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
5. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tingkat efektifitas dan efisensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.1 yang menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2021, Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra BPKK Aceh Jaya s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2021	Realisasi Renja SKPK Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100.00	1 dok	5 dok	100.00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 lap		1 lap	lap		1 lap	1 lap	50.00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100.00	1 dok	5 dok	100.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100.00	12 bln	60 bln	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100.00	10 jenis	10 jenis	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	95 unit	52 unit	18 unit	18 unit	100.00	26 unit	95 unit	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik	43 jenis	43 jenis	43 jenis	43 jenis	100.00	43 jenis	43 jenis	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	275.680 lbr	162925 lbr	38.860 lbr	38.000 lbr	97.79	74.960 lembar	##### lembar	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100.00	1 jenis	1 jenis	100.00
	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu	250 kall	135 kali	50 kali	55 kall	110.00	50 kali	240 kali	96.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPK	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1.010 kali	562 kali	317 kali	195 kali	61.51	184 kali	941 kali	93.17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2021	Realisasi Renja SKPK Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	6 unit	3 unit	unit	unit	-	3 unit	6 unit	100.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur	32 unit	20 unit	1 unit	1 unit	100.00	13 unit	34 unit	106.25
5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	60 bulan	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas	32 org	32 orang	32 org	32 org	100.00	32 org	32 org	100.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	4 unit	2 unit	4 unit	2 unit	50.00	4 unit	4 unit	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	74 unit	21 unit	25 unit	21 unit	84.00	33 unit	75 unit	101.35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	45 unit	15 unit	45 unit	20 unit	44.44	10 unit	45 unit	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100.00	1 unit	1 unit	100.00
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>									
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen	4 dok		2.00 dok	2 dok	100.00	2 dok	4 dok	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen	4 dok		2.00 dok	2 dok	100.00	2 dok	4 dok	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen	88 dok		44.00 dok	44 dok	100.00	44 dok	88 dok	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan	88 lap		44.00 lap	44 lap	100.00	44 lap	88 lap	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen	88 lap		44.00 lap	44 lap	100.00	44 dok	88 dok	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan	88 lap		44.00 lap	44 lap	100.00	44 lap	88 lap	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah laporan	25 lap	15 lap	5 lap	5 lap	100.00	5 lap	25 lap	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2021	Realisasi Renja SKPK Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah laporan	25 lap	15 lap	5 lap	5 lap	100.00	5 lap	25 lap	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dok SP2D	57767 dok	34900 dok	11250 dok	11247 dok	99.97	11620 dok	57.767 dok	100.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen	3650 dok	2190 dok	728 dok	728 dok	100.00	728 dok	3.646 dok	99.89
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi	18 kali	kali	kali	9 kali	-	9 kali	18 kali	100.00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah	4 dok	2 dok			-	2 dok	4 dok	100.00
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>								-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	30 lap	18 lap	6 lap	6 lap	100.00	6 lap	30 lap	100.00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	5 lap	4 lap	-	-	-	1 lap	5 lap	100.00
5.02.02.2.03	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan/disalurkannya Bantuan Keuangan Khusus	860 lap	516 lap	172 lap	172 lap	100.00	172 lap	860 lap	100.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya belanja darurat dan mendesak	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100.00	12 bln	60 bln	100.00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	860 lap	516 lap	172 lap	172 lap	100.00	172 lap	860 lap	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2021	Realisasi Renja SKPK Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>									
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	2 lap	lap	1 lap	1 lap	-	1 lap	2 lap	100.00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	2	lap	1 lap	1 lap	-	1 lap	2 lap	100.00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	100 dok	- dok	50 dok	50 dok	100.00	50 dok	100 dok	100.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	80	- lap	40 lap	40 lap	-	40 lap	80 lap	100.00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	200 dok		-	dok	-	100 dok	100 dok	50.00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan	15 lap	9 lap	3 lap	3 lap	100.00	3 lap	15 lap	100.00
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>									
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan	5 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100.00	1 lap	5 lap	100.00

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Pada tahun 2022 ini Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya berusaha untuk terus meningkatkan PAD, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pengelolaan Aset secara cepat, tepat dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKK yaitu melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terus berbenah diri bersama BAPPEDA telah berusaha merencanakan dan berupaya APBK ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), meningkatkan pelayanan pencairan dana (SP2D). Pelayanan perpajakan kepada masyarakat terutama dalam pengurusan NPWPD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB yang cepat dan tepat waktu. Kondisi yang diinginkan sebagai penentu keberhasilan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD yang berbasis aktual.
3. Tersedianya Sistem Informasi yang baik dan dapat melayani kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online.
4. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan memikirkan upaya peningkatan penerimaan PAD.

8. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman

9. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum target pelayanan pada BPKK dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yaitu tentang perencanaan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
2. OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yaitu terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pencairan dana kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Pemangku kepentingan dalam hal pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak PBB, BPHTB, hotel, restoran, reklame, parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peran dalam melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang keuangan, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Rendahnya pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor Retribusi.
2. Masih rendahnya penyerapan belanja daerah.
3. Kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran.
4. Pengguna dan pengurus barang milik daerah belum sepenuhnya disiplin dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara baik.
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.
6. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memotong/cash langsung pajak daerah pada penerimaan Pembayaran atas layanan Pajak Restoran.
7. Masih terbatasnya petugas pajak daerah.

8. Masih ada pengusaha restoran yang belum menggunakan mesin cash register sehingga menyulitkan petugas dalam pemeriksaan pelaporan pajak daerah.
9. Belum adanya PPNS khusus perpajakan daerah.
10. Belum optimalnya sosialisasi PDRD kepada masyarakat.
11. Masih lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Pajak Daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- d. Pembinaan UPTB; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban APBK. Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terhadap 3 indikator kinerja tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten  
Aceh Jaya

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Realisasi capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LKIP BPKK			58,97	66,30	62,25	63,00	58,97	66,30	62,25	63,00	
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya			24,34	27,34	3,84	3,84	-8,51	27,34	3,84	3,84	

Pencapaian indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mendapat opini WTP dari BPK RI yang didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

1). Program pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari:

1. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
3. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

2). Program pengelolaan barang milik daerah dengan kegiatan pengelolaan barang milik daerah

➤ Pada Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya sebesar Rp.72.477.015.955,- dan realisasi sebesar Rp.75.575.290.760,23,- atau sebesar 104,27% yang didukung dengan program pengelolaan pendapatan daerah dengan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

➤ Tahapan penyusunan anggaran sudah memenuhi target yang direncanakan dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 30 Desember 2021, yang didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BPKK**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi

oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya untuk tahun 2023 – 2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu:

- a. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
- b. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
- c. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang belum optimal;
- e. Belum seluruhnya proses operasional memiliki prosedur operasional baku (*Standar Operating Procedure*);
- f. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPK yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBK dengan dokumen perencanaan daerah;
- g. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- h. Pengembangan aset belum seluruhnya diatribusikan ke aset induk;
- i. Belum seluruhnya dilakukan pendataan ulang terhadap WP PBB P2;
- j. Belum adanya data base WP dan WR;
- k. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- l. Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- m. Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih belum cukup; dan
- n. Kurangnya komitmen pimpinan SKPK terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif;
5. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;
6. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan

b. Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, sedangkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
2. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;

3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah SKPK;
4. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkatnya intensitas;
5. Masih adanya aset di SKPK yang belum dioptimalkan;
6. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran program/kegiatan;
8. Adanya tanah milik daerah namun bangunan di atasnya merupakan bangunan yang dibangun dari sumber pembiayaan diluar APBD dan belum diserahkan ke daerah;
9. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
10. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum diserahkan;
11. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ; dan
12. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertical;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset dinas.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK**

Perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, namun akibat keterbatasan dana dan anggaran yang tersedia tidak semua program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) dapat terealisasi.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPK dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPK, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPK berdasarkan rancangan awal RKPK.

Review terhadap rancangan awal RKPK, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja BPKK ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKK. Perumusan rancangan awal Renja BPKK dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada BPKK, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun lalu berdasarkan Renstra BPKK, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK, telaahan terhadap rancangan awal RKPK, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKK, penyempurnaan rancangan Renja BPKK, pembahasan forum SKPK, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam prosesnya juga diperbandingkan antara program-program yang sudah dituangkan dalam RKPK dengan hasil analisa kebutuhan yang didasarkan pada plafon dan prioritas anggaran. Hasil review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2023 tercantum pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Revie terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2023**  
**BPKK Aceh Jaya**

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan SKPK			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan SKPK			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	5.010.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.927.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	5.010.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	4.948.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	7.865.003.633	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	9.021.558.486	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Lap	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPK	1 Lap	29.613.400	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya</b>			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	20.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.985.046	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.984.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	247.869.792	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	223.550.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.075.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.796.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1.123.632	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1.080.000	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	23.772.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	23.770.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	246.413.640	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	246.413.640	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. A. Jaya				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. A. Jaya				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		125.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	285.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	37.806.650	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	64.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Kab. A. Jaya				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Kab. A. Jaya				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	498.249.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	179.094.364	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	703.328.428	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	17.253.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	22.159.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	124.599.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	86.233.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	192.396.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	104.039.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	42.570.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	365.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	219.091.840	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah</b>			
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran</b>			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran</b>			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.341.200	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.339.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.362.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.347.900	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	52.912.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	48.840.800	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	36.020.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	42.618.100	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	52.912.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	49.839.100	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	36.020.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	40.921.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	195.895.800	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	215.540.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	210.537.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	241.558.600	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	26.835.400	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	95.141.500	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	33 Orang	616.499.200	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	632.317.850	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Kab. A. Jaya				<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11620 Dok	112.999.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11620 Dok	137.930.300	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	728 Dok	24.998.700	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	728 Dok	24.991.700	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok	58.465.900	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok	48.880.800	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	50 Dok	60.700.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Kab. A. Jaya	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	50 Dok	60.598.600	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	6 Dok	213.239.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dok	262.748.900	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	15.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	14.997.800
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	7.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	6.990.100
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	43 Orang	5.337.398	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	5.304.000
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Lap	179.807.842.400	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. A. Jaya	Jumlah laporan/disalurkan nya Bantuan Keuangan Khusus	4 Lap	161.958.494.500
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	1.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. A. Jaya	Terlaksananya belanja darurat dan mendesak	1 Lap	3.000.000.000
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Lap	889.194.535	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	2 Lap	783.956..971
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan SIPD</b>			<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>				
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	72.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	72.000.000

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kab. A. Jaya				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kab. A. Jaya				<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
	Penyusunan Standar Harga	Kab. A. Jaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	53.174.400	Penyusunan Standar Harga	Kab. A. Jaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	64.625.200	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Lap	14.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Lap	12.232.500	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	17.749.200	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	12.970.600	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	339.998.400	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	23.078.100	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Lap	444.499.400	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Lap	108.141.200	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap	39.939.800	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap	39.927.800	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Lap	29.749.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Lap	20.408.000	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 Dok	24.749.700	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 Dok	19.449.700	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	36.748.400	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	9.748.400	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Kab. A. Jaya				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					
	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Kab. A. Jaya				<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>					

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	45.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	34.999.700	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Lap	20.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Lap	20.006.300	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan	2 Unit	21.250.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Lap	50.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Lap	35.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap	34.983.500	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap	37.989.200	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. A. Jaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	362 OP	140.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. A. Jaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	362 OP	102.539.800	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	30.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	38.267.700	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dok	51.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dok	20.002.800	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan, lokasi indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKK Aceh Jaya tahun 2023 dalam program pembangunan Aceh Jaya sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun besaran pagu yang berubah dari rancangan awal dikarenakan ada jenis-jenis belanja yang harus disesuaikan seperti honorarium dalam sub kegiatan dan belanja yang berdampak dengan aturan outsourcing.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya juga menampung usulan dari pemangku kepentingan yaitu Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRK yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBK.

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 BPKK Aceh Jaya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa	Kab. Aceh Jaya, Sebagian Kecamatan	Jml Gampong	47 Gampong	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Merencanakan suatu pembangunan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pemerintah mempunyai tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh sasaran pokok pembangunan nasional, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah sasaran ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk transformasi pelayanan publik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau *e-services*, serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja

pelayanan serta penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik dan penguatan pelayanan terpadu atau terintegrasi .

Program Prioritas Pembangunan Provinsi yang selaras dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Adapun Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJP Aceh Jaya tahun 2005-2025, dimana saat ini memasuki Tahapan Pembangunan Ke-4 (2020-2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Jaya yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud Kabupaten Aceh Jaya yang maju dengan masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan bertaqwa dalam tatanan pemerintah yang baik. Adapun prioritas pembangunan RPJM Aceh yang searah dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah peningkatan kualitas SDM dalam upaya optimalisasi penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna, teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, arah kebijakan umum pembangunan Aceh Jaya tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada pelaksanaan pembangunan daerah periode sebelumnya, juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional dan Aceh serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional dan Aceh, maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan regulasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan strategis

dan cepat tumbuh sebagai upaya untuk memantapkan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

3. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan MEA melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, membangun strategi untuk lebih meningkatkan investasi dengan menyederhanakan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi;
4. Perwujudan program dan kegiatan sesuai kewenangan melalui strategi pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;
5. Optimalisasi pendayagunaan potensi kewilayahan dengan mengedepankan optimalisasi tata kelola produk unggulan masing-masing kecamatan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan rohani dan jasmani, kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan sarana umum lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian gampong melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan gampong dan pengembangan ekonomi pedesaan;
8. Meningkatkan pembangunan gampong melalui sinergitas perencanaan pembangunan gampong dan kabupaten;
9. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang tangguh, terintegrasi dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
10. Mengimplementasikan pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh kementerian sesuai dengan kewenangan kabupaten;
11. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kinerja SKPK dengan penerapan

Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang pekerjaan dan peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan efisien yang berprinsip pada anggaran yang berbasis kinerja;

12. Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
13. Memberikan kesempatan pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, daya saing, dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung peningkatan mutu;
14. Penguatan nilai-nilai keagamaan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh;
15. Pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui upaya peningkatan peran pemuda, meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam pembangunan serta mencegah penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
16. Meningkatkan kompetensi dan kesempatan kerja serta pengembangan kawasan transmigrasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten**

Dalam penetapan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPK Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien, serta Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme ASN yang Berdaya saing. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi ril dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap kelanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPKK Aceh Jaya yaitu:

1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan keuangan SKPK.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
5. Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran.
6. Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 177.856.021.765,-. Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 10.723.528.480,-.

Kegiatannya yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

7. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Mebel
    3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 2 sub kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.  
 Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 166.519.595.985,-.  
 Kegiatannya yaitu:
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 10 sub kegiatan:
    1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
    2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
    4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
    5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
    6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  10. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  2. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
    1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
    2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
    3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
  - 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
    1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 310.581.500,-, yaitu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 9 sub kegiatan:
1. Penyusunan Standar Harga
  2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 4 Inventarisasi Barang Milik Daerah
  5. Pengamanan Barang Milik Daerah
  6. Penilaian Barang Milik Daerah
  7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
  9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 302.315.800,-, yaitu kegiatannya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan:

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya seperti yang tercantum pada tabel 3.1.

Label 3.1

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5															
5	02														
5	02	01													
5	02	01	2.01												
5	02	01	2.01	01											
5	02	01	2.01	07											
5	02	01	2.02												
5	02	01	2.02	01											
5	02	01	2.02	07											
5	02	01	2.05												
5	02	01	2.05	02											
5	02	01	2.05	11											

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyediaan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	604,669,640						100 persen	641,614,656	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,984,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Paket	5,084,747	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	223,550,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	4 Paket	252,827,188	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	64,075,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	5 Paket	65,355,119	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40,796,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	4 Paket	41,611,838	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,080,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Dokumen	1,146,105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	23,770,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	24,247,746	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	246,413,640	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	251,341,913	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Unit		0 Unit	8 Unit	262,806,650						8 Unit	268,173,504	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	125,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	3 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	37,806,650	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	4 Unit	68,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	1 Unit	200,173,504	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	<b>196,347,364</b>						100 persen	<b>480,282,544</b>	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	179,094,364	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	340,233,008	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17,253,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	140,049,536	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148 Unit		0 Unit	33 Unit	<b>578,657,440</b>						33 Unit	<b>586,368,645</b>	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	124,599,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Unit	127,094,224	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	192,396,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	5 Unit	192,405,660	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 25 Unit	42,570,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	0 Unit 25 Unit	43,395,084	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219,091,840	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	223,473,677	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini		Opini	WTP Opini	<b>166,519,595,985</b>						WTP Opini	<b>172,706,669,511</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran	752 Dokumen		0 Dokumen	188 Dokumen	<b>1,537,464,750</b>						188 Dokumen	<b>1,568,214,636</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	85,339,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	88,786,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	85,347,900	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	88,795,955	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	48,840,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	50,813,968	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	42,618,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	44,339,871	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	49,839,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	50,835,921	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	40,921,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	41,739,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	215,540,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	198,791,055	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	241,558,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	0 Dokumen 2 Dokumen	225,859,974	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	95,141,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	0 Dokumen 1 Dokumen	98,985,217	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				33 Orang	632,317,850	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	33 Orang	664,266,275	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	49448 Dokumen		0 Dokumen	12362 Dokumen	<b>272,401,400</b>						12362 Dokumen	<b>324,199,938</b>	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				11620 Dokumen	137,930,300	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	11620 Dokumen	146,035,338	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				728 Dokumen	24,991,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	728 Dokumen	28,998,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				9 Dokumen	48,880,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	9 Dokumen	60,465,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABJPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	60,598,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	5 Dokumen	88,700,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	32 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	<b>290,040,800</b>					Seluruh SKPK	8 Dokumen	<b>257,388,436</b>	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				6 Dokumen	262,748,900	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	6 Dokumen	213,239,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	14,997,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6,990,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	13,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				43 Orang	5,304,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	43 Orang	16,148,936	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN
5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase penyaluran dana transfer kepada pemerintah desa yang sesuai perundang-undangan yang berlaku	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>164,347,689,035</b>					Seluruh SKPK	100 Persen	<b>170,483,426,501</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0 Laporan	161,958,494,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	0 Laporan	166,317,510,154	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1,500,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	1 Laporan	1,522,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	889,194,535	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	1 Laporan	2,643,416,347	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan SIPD	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	<b>72,000,000</b>						1 Dokumen	<b>73,440,000</b>	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	72,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	73,440,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini		0 Opini	WTP Opini	<b>310,581,500</b>						WTP Opini	<b>387,800,000</b>	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan pengelolaan BMD	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>310,581,500</b>						100 Persen	<b>387,800,000</b>	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	64,625,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	12,232,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	12,970,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	23,078,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Laporan	46,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	108,141,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	50 Laporan	45,800,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 3 Laporan	39,927,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	0 Laporan 3 Laporan	48,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				40 Laporan	20,408,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	40 Laporan	38,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100 Dokumen	19,449,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	100 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3 Laporan	9,748,400	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	3 Laporan	40,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya	3.84 Perser		0 Persen	3.84 Perser	<b>302,315,800</b>						3.84 Perser	<b>369,734,764</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3.84 persen		0 persen	3.84 persen	<b>302,315,800</b>						3.84 persen	<b>369,734,764</b>	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Dokumen	27,260,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	5 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	20,006,300	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	110,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	21,250,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Unit	15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	35,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	37,989,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	38,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	102,539,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Obyek Pajak	84,900,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	38,267,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	21,100,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Layanan	1,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	3,900,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	20,002,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	2,150,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen		Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Dokumen	4,105,651	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan		Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	1,079,113	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan		Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
<b>TOTAL</b>							<b>177,856,021,765</b>							<b>183,980,366,197</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA**

Pendanaan program dan kegiatan BPKK merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5																
5	02															
5	02	01														
5	02	01	2.01													
5	02	01	2.01	01												
5	02	01	2.01	07												
5	02	01	2.02													
5	02	01	2.02	01												
5	02	01	2.02	07												
5	02	01	2.05													
5	02	01	2.05	11												
5	02	01	2.06													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	49448 Dokumen		0 Dokumen	12362 Dokumen	272,401,400						12362 Dokumen	324,199,938	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				11620 Dokumen	137,930,300	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	11620 Dokumen	146,035,338	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				728 Dokumen	24,991,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	728 Dokumen	28,998,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				9 Dokumen	48,880,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	9 Dokumen	60,465,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	60,598,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	5 Dokumen	88,700,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	32 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	290,040,800						8 Dokumen	257,388,436	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				6 Dokumen	262,748,900	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	6 Dokumen	213,239,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	14,997,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	85,347,900	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	88,795,955	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	48,840,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	50,813,968	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	42,618,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	44,339,871	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	49,839,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	50,835,921	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	40,921,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	44 Dokumen	41,739,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	215,540,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	198,791,055	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	241,558,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	0 Dokumen 2 Dokumen	225,859,974	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	95,141,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	0 Dokumen 1 Dokumen	98,985,217	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				33 Orang	632,317,850	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	33 Orang	664,266,275	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Derah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	196,347,364						100 persen	480,282,544	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	179,094,364	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	340,233,008	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17,253,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	140,049,536	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148 Unit		0 Unit	33 Unit	578,657,440						33 Unit	586,368,645	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	124,599,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Unit	127,094,224	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	192,396,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	5 Unit	192,405,660	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 25 Unit	42,570,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	0 Unit 25 Unit	43,395,084	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219,091,840	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	223,473,677	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini		Opini	WTP Opini	166,519,595,985						WTP Opini	172,706,669,511	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran	752 Dokumen		0 Dokumen	188 Dokumen	1,537,464,750						188 Dokumen	1,568,214,636	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	85,339,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	2 Dokumen	88,786,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,984,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Paket	5,084,747	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	223,550,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	4 Paket	252,827,188	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	64,075,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	5 Paket	65,355,119	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40,796,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	4 Paket	41,611,838	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,080,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Dokumen	1,146,105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	23,770,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	24,247,746	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	246,413,640	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	BPKK	1 Laporan	251,341,913	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Unit		0 Unit	8 Unit	<b>262,806,650</b>						8 Unit	<b>268,173,504</b>	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	125,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	3 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	37,806,650	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	4 Unit	68,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN BPKK	1 Unit	200,173,504	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6,990,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	1 Dokumen	13,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				43 Orang	5,304,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPK	43 Orang	16,148,936	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase penyaluran dana transfer kepada pemerintah desa yang sesuai perundang-undangan yang berlaku	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>164,347,689,035</b>						100 Persen	<b>170,483,426,501</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0 Laporan	161,958,494,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	0 Laporan	166,317,510,154	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1,500,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	1 Laporan	1,522,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	889,194,535	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Aparatur Gampong	1 Laporan	2,643,416,347	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan SIPD	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	<b>72,000,000</b>						1 Dokumen	<b>73,440,000</b>	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	72,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	73,440,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini		0 Opini	WTP Opini	<b>310,581,500</b>						WTP Opini	<b>387,800,000</b>	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan pengelolaan BMD	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>310,581,500</b>						100 Persen	<b>387,800,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	64,625,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	12,232,500	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	12,970,600	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	23,078,100	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Laporan	46,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	108,141,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	50 Laporan	45,800,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 3 Laporan	39,927,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	0 Laporan 3 Laporan	48,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				40 Laporan	20,408,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	40 Laporan	38,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100 Dokumen	19,449,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	100 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3 Laporan	9,748,400	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	3 Laporan	40,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Jaya  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kefompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya	3.84 Persen		0 Persen	3.84 Persen	302,315,800					3.84 Persen	369,734,764		
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3.84 persen		0 persen	3.84 persen	302,315,800					3.84 persen	369,734,764		
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Dokumen	27,260,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	5 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	20,006,300	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	110,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	21,250,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Unit	15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	35,000,000	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	37,989,200	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Laporan	38,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	102,539,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Obyek Pajak	84,900,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	38,267,700	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	21,100,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	20,002,800	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Wajib Pajak dan Retribusi	2 Dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
<b>TOTAL</b>							<b>177,856,021,765</b>							<b>183,980,366,197</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023, disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPK BPKK Aceh Jaya juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun; dan
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja BPKK Aceh Jaya ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKK Aceh Jaya yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Seluruh rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan dokumen pendukung pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya Tahun 2023-2026.

Calang, 15 Juli 2022

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten  
Aceh Jaya

  
**SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720327 200212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya  
Telp/Fax. (0654) 002210251, Email: bplk.acehjaya@gmail.com Kode Pos 23654

**CALANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**  
**ACEH JAYA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**  
**ACEH JAYA TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyajian Rancangan Rencana Kerja SKPK;
  - b. bahwa untuk menyelaraskan program kegiatan dengan penganggaran masa 1 (satu) tahun kedepan diwujudkan dalam Penyusunan Rencana Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dirasa perlu adanya Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
  8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.  
KEDUA : Menetapkan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang.

pada tanggal 14 Juli 2022 M  
23 Dzulqai'dah 1443 H

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN  
ACEH JAYA,



**SAFRUL MARYADI**

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKK ACEH JAYA  
NOMOR : 24 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 JULI 2022 M  
23 DZULHIJAH 1443 H

**PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENJA  
BPKK ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<b>a</b>	<b>Tim Koordinasi</b>	
1	Kepala BPKK	Ketua
2	Sekretaris BPKK	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pendapatan	Anggota
4	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5	Kepala Bidang Aset	Anggota
6	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
<b>b</b>	<b>Tim Penyusun</b>	
1	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusun
2	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Penyusun
3	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN  
ACEH JAYA,

  
SAFRUL MARYADI

**BERITA ACARA PENYELARASAN/EVALUASI  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA-SKPK) TAHUN 2023**

**Hari : Senin 6 Juli 2022**  
**Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai**  
**SKPK : BPKK**

No	Uraian	Kesesuaian		Tidak Lanjut Penyempurnaan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
1.	Surat Keputusan Kepala SKPK tentang Tim Penyusunan Renja SKPK	√		Lengkap dan dilampirkan dalam dokumen
2.	Sistematika Renja SKPK Tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yaitu :	√		Sesuai dengan Sistematika dalam Permendagri 86 Tahun 2017
	<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	√		
	1.1 Latar Belakang	√		ada
	1.2 Landasan Hukum	√		ada
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		ada
	1.4 Sistematika Penulisan	√		ada
	<b>BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA SKPK TAHUN LALU</b>	√		
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPK	√		Lengkapi Narasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li> <li>2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li> <li>3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li> <li>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;</li> <li>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan</li> <li>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor</li> </ol>

No	Uraian	Kesesuaian		Tidak Lanjut Penyempurnaan
		Ada	Tidak Ada	
				penyebab tersebut.
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPK	√		ada
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK	√		Sudah baik
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	√		Sebaiknya memuat tentang Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda, yang nantinya akan ditampilkan pada tabel 2.3
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		Sebaiknya memuat <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;</li> <li>2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</li> <li>3. Pada table 2.4 Sebaiknya indikator kinerja dilengkapi/diisi sesuai dengan indikator kinerja program</li> </ul>
	<b>BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPK</b>	√		
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	√		ada
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK	√		
	3.3 Program dan Kegiatan	√		Sebaiknya juga memuat terkait narasi tentang Capain – capaian indikator pembangunan sesuai dengan RPJMK, SDGs, Pengentasan kemiskinan  Berikan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun Kombinasi keduanya.

No	Uraian	Kesesuaian		Tidak Lanjut Penyempurnaan
		Ada	Tidak Ada	
				Lampirkan Cetak Laporan Renja yang Penetapan pada SIPD Koreksi penomoran table menjadi Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
	BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPK	√		Lampirkan Cetak Laporan RKPD yang Penetapan pada SIPD Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	BAB V : PENUTUP	√		Penutup sudah baik  Sesuaikan Tanggal Pengesahan Dokumen Oleh Kepala SKPD, pada tanggal 8 Juli 2022

Unsur SKPK,  
BPKK Kabupaten Aceh Jaya



(.....Nurmalahayati.....)  
Nip. 19711010 200604 2 002

Pemeriksa Renja,  
Bappeda Kabupaten Aceh Jaya



(.....M. Akbar Hardiansyah.....)  
Nip. 19950612 202012 1 008